

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

---

**KOMUNIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EMBUNG  
DESA DI DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII  
KOTO KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)  
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Riau



**NAUFAL MIFDHAL**

NPM : 169110159  
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI  
KONSENTRASI : HUMAS

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini, antara lain yakni:

1. Dr. Abdul Aziz., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Eka Fitri Qurniawati, M.I.Kom selaku pembimbing skripsi serta sekaligus KA Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan penelitian ini.
3. Dr. Fatmawati, S.IP, MM dan Dyah Pithaloka, M. Si selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberi saran kepada peneliti dalam penulisan penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang telah memberikan didikan dan bimbingan selama melaksanakan studi, serta

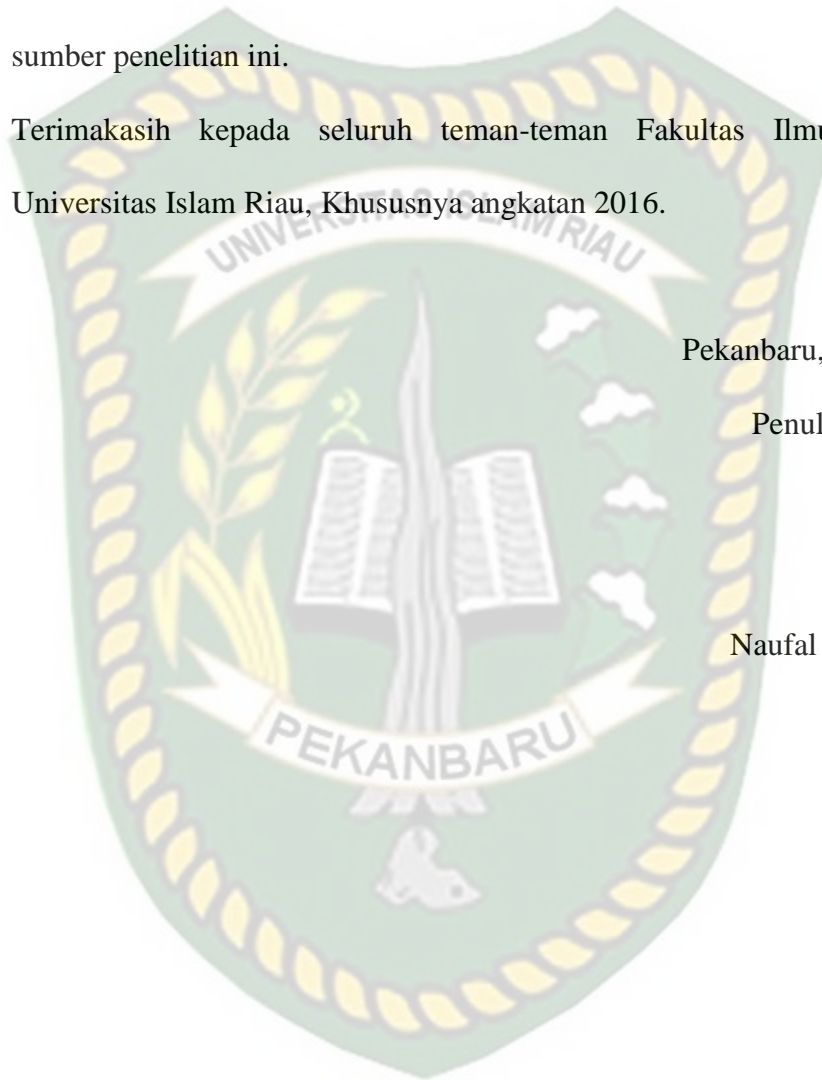
seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau atas bantuannya memperlancar urusan administrasi selama penulisan ini.

5. Para informan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data atau sumber penelitian ini.
6. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Khususnya angkatan 2016.

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Penulis,

Naufal Mifdhal



## DAFTAR ISI

*Cover*

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Manfaat .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Literatur .....	12
1. Komunikasi Pembangunan .....	12
2. Perencanaan Komunikasi .....	15
3. Koordinasi .....	18
4. Partisipasi Masyarakat .....	20
5. Pemerintah Desa .....	23
6. Pembangunan Infrastruktur .....	27
B. Definisi Operasional .....	29
C. Penelitian Terdahulu Relevan .....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	38

E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Hasil Penelitian .....	51
C. Pembahasan Penelitian.....	64
<b>BAB V : Penutup</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Relevan .....	31
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	37
Tabel 4.1 Tabel Anggaran Pembangunan Infrastruktur Embung Desa .....	45
Tabel 4.2 APBDes Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar .....	46
Tabel 4.3 Hasil Musrenbang Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar .....	47
Tabel 4.4 Daftar Informan Penelitian.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Embung Desa Pongkai Istiqomah .....	7
Gambar 3.1 Model analisis data menurut Miles dan Huberman.....	43
Gambar 4.1 Struktur Tata Kerja Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah .....	50
Gambar 4.2 Kantor Kepala Desa Pongkai Istiqomah .....	51

### Lampiran

SK Pembimbing

Lembaran Persetujuan Revisi Tim Seminar Usulan Penelitian

Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Berita Acara Musyawarah Desa RKPDes Tahun 2019

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Foto Dengan Informan

Lampiran 3 : Plakat pembangunan infrastruktur embung desa serta Musrenbang  
Desa Tahun 2019

Lampiran 4 : Identitas pembangunan infrastruktur embung desa

Lampiran 5 : Foto Pelaksanaan Pembangunan Embung Desa dan Foto saluran air  
kerumah masyarakat

Lampiran 6 : Biodata Peneliti

## Abstrak

### KOMUNIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EMBUNG DESA DI DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

**Naufal Mifdhal**  
**169110159**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya aspirasi dari masyarakat dalam pemenuhan sarana kebutuhan dasar air bersih. Pembangunan infrastruktur embung desa sendiri menjadi sebuah pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa Pongkai Istiqomah beserta dengan masyarakatnya melalui sebuah musyawarah. Penelitian ini terfokus kepada komunikasi pembangunan infrastruktur embung desa di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pembangunan infrastruktur embung desa di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Komunikasi Pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi diantara semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat dengan pemerintah sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan komunikasi pembangunan infrastruktur embung desa di Desa Pongkai Istiqomah, serta menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Penelitian ini menetapkan 3 orang narasumber yakni kepala desa, anggota BPD, dan masyarakat sekaligus Tim RKPDes tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah desa menggunakan strategi partisipatori dan media dalam menyampaikan pesan pembangunan. Pemerintah desa Pongkai Istiqomah sudah menjadi komunikator yang cukup baik dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan sehingga berdampak akan sebuah pembangunan yang berguna untuk masyarakat.

**Kata Kunci** : Komunikasi, Pembangunan, Infrastruktur.



*Abstract*

*Development Communication in Village Reservoir Infrastructure At Pongkai Istiqomah XIII Koto Kampar Sub-District*

**Naufal Mifdhal**  
**169110159**

*This research motivated by the many aspiration from rural community about clean water and sanitation compliance of basic needs. Reservoir infrastructure development itself become a development planned by the government and rural community on the discussion. This research focuses development communication on reservoir infrastructure development at Pongkai Istiqomah XIII Koto Kampar Sub-District. Development communication includes the role and function of communication between all partisipants, especially rural communities and government since planning, implementation and evaluation procces. The aim from this research to find out how development communication in the of reservoir infrastructure at Pongkai Istiqomah XIII Koto Kampar Sub-District. In this research, researcher used qualitative research methods with a descriptive approach that mean to describe and explain reservoir infrastructure at Pongkai Istiqomah, and using Miles and Huberman analytical tehcniques. This research assign 3 speakers, that is headman, BPD Chairs, and 1 rural community and as a member of RKPDes 2019. The result show, Pongkai Istiqomah government using partisipasory strategies and media based strategies in conveying development message. The government Pongkai Istiqomah has become a pretty good communicator in delivering development messages so rural communities get impact of development useful.*

**Keywords** : *Communication, Development, Infrastructure*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan sebuah bagian penting dan juga desa sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak zaman dulu desa adalah komunitas sosial yang menjadi inti asli bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia sendiri terbentuk dari asal yang namanya desa.

Saat ini, desa sudah memiliki kewenangan seperti yang tercermin dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa desa, hak asal usul, adat istiadat desa.

Pembangunan memiliki tujuan agar terwujudnya suatu masyarakat yang makmur merata baik secara materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan-ketentuan lainnya dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Membangun desa merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan adanya partisipasi masyarakat desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan desa tertuang dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam sebuah proses pembangunan tentu akan membutuhkan perencanaan, perencanaan saling berkaitan dengan aspek-aspek komunikasi didalamnya. Sejak penghujung 60-an, dikalangan ilmu komunikasi telah berkembang suatu spesialisasi mengenai penerapan teori dan konsep komunikasi secara khusus untuk keperluan

pelaksanaan program pembangunan. Pengkhususan itu kemudian dikenal dengan sebutan komunikasi pembangunan.

Secara konsep, komunikasi dan pembangunan menumpang satu sama lain menjadi sebuah komunikasi pembangunan. Komunikasi dipergunakan menjadi jembatan arus informasi antara pemerintah kepada masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan pembangunan dipergunakan sebagai karakter untuk berubah secara berkelanjutan, dan proses dari satu kondisi ke kondisi yang lain atau dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, melalui proses komunikasi pembangunan dapat disampaikan agar dapat diterima oleh khalayak agar mencapai tujuannya.

Salah satu Instrument yang paling penting dalam pembangunan dipedesaan yang dilakukan oleh pemerintah yakni pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat untuk menumpang masyarakat dalam mejalankan sosio-ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yakni aspek penting dan vital untuk membangun sebuah pembangunan nasional. Sebuah wilayah akan dikatakan bagus apabila infrastruktur sudah memadai untuk menumpang kebutuhan masyarakatnya dan kegiatan ekonominya. Kebalikannya suatu daerah dikatakan tidak bagus apabila infrastruktur yang dimiliki kurang memadai, maka ekonominya dapat dikatakan tidak bagus. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang ada.



Infrastuktur sendiri merupakan segala jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastuktur umumnya merujuk pada pembangunan fisik untuk fasilitas umum seperti; jalan raya, bandar udara, pelabuhan, listrik, air bersih dan lain-lain. Menurut N. Gregory Mankiw (2003), dalam ilmu ekonomii, arti infrastuktur adalah wujud modal public (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan infrastuktur pertahun tentunya harus ditopang oleh anggaran dana desa (ADD). Desa juga memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa pertahun. Maka dari itu, pemerintah desa melalui RKPDes merencanakan hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dana desa kemudian dialokasikan kepada perencanaan pembangunan. Didalam perencanaan pembangunan infrastuktur pemerintah desa memiliki suatu rancangan bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam berkoordinasi. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi yang



menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Koordinasi bersifat mengikat, mempersatukan dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha.

Guna mencapai suatu titik pelaksanaan pembangunan sendiri. Pemerintah desa tentu akan membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi digunakan dalam mengambil keputusan agar terjuwudnya pembangunan dibutuhkan, karena sebuah pembangunan dikatakan berhasil yakni dengan adanya dukungan oleh semua lapisan masyarakat, agar masyarakat memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of responsibility* (rasa tanggung jawab terhadap program pembangunan).

Untuk mendapatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, desa mempunyai suatu kegiatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perencanaan dengan masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan tersebut yakni Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Musrenbang merupakan kegiatan pertukaran pesan *stakeholder* dari masyarakat ke pemerintah maupun sebaliknya demi keberlangsungan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Musrenbang Desa menjadi acuan pemerintah guna mencapai tujuan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Dalam musrenbang desa Pongkai Istiqomah tahun 2019, permintaan yang paling menonjol dari masyarakat yakni permintaan embung desa/sanitasi air bersih karena hampir setiap dusun dan petinggi adat meminta pembangunan tersebut.

Pemerintah desa dapat melihat apa yang menjadi prioritas pembangunan dari keberlangsungan hidup masyarakatnya. Melalui Musrenbang Desa, masyarakat

menginginkan adanya perubahan yang dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat.

Setelah mendapat hasil perencanaan bersama, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah menyampaikan hasil rapat musrenbang desa kepada masyarakat umum guna memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dapat menerima informasi tersebut.

Desa Pongkai Istiqomah memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Akan tetapi jika keadaan pada saat musim kemarau desa Pongkai Istiqomah sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sumur bor yang tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat yang mana sering terjadi antrian panjang di sungai Binamang.

Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar termasuk salah satu desa yang sedang melaksanakan program pembangunan infrastruktur air bersih. Air bersih merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, dimana manusia dapat memanfaatkannya untuk berbagai macam aktivitas sehari-hari contohnya untuk minum, mandi, sanitasi, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan air merupakan komponen utama yang paling mendasar bagi kehidupan manusia.

Menurut Kepmenkes RI No. 1405/MENKES/SK/IX/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.

Kemudian daripada itu, Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah Kec. XIII Koto Kampar saat ini masih sedang berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur terkait penyediaan air bersih di Desa Pongkai Istiqomah guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa beserta dengan masyarakat melakukan musyawarah untuk membuat sebuah embung desa yang bertujuan untuk menyalurkan air bersih kerumah-rumah masyarakat.

**Gambar 1.1**  
**Embung Desa Pongkai Istiqomah**



**Sumber: Dokumentasi Peneliti**

Kemudian daripada itu, penanggung jawab pembuatan embung desa sendiri berasal dari pemerintah desa Pongkai Istiqomah. Akan tetapi dalam membangun embung tersebut masyarakat juga ikut andil menjadi Tim RKPDes. Yakni Muhammad Husni beserta anggota lainnya yang menjadi salah satu penanggung jawab pembuatan embung desa tersebut.

Terkait dengan pembangunan embung desa tersebut, aspirasi dari masyarakat terkesan lamban untuk dipenuhi oleh pemerintah desa Pongkai Istiqomah. Yang mana terlihat dari banyaknya aspirasi masyarakat pada forum musrenbang desa tentang pembangunan infrastruktur embung desa, pemerintah seolah-olah kurang memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Padahal, sarana air bersih merupakan pemenuhan kebutuhan dasar oleh pemerintah desa untuk masyarakat.

Dan juga masih kurangnya penyampaian informasi dari pemerintah terkait dengan perencanaan pembangunan yang fleksibel, efektif dan transparan dari pemerintah desa Pongkai Istiqomah. Yang mana terlihat masih banyaknya masyarakat yang tidak atau belum mengetahui terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur embung desa. Masyarakat umum hanya tiba-tiba mengetahui setelah proses pelaksanaan berjalan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KOMUNIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EMBUNG DESA DI DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.**



## **B. Identifikasi Masalah**

Saat ini peneliti mendapatkan identifikasi masalah pada komunikasi pembangunan dalam pembangunan infrastruktur embung desa di Desa Pongkai Istiqomah Kec. XIII Koto Kampar. Identifikasi masalah tersebut berupa:

1. Masih banyaknya pesan-pesan dari masyarakat dalam permintaan pemenuhan kebutuhan dasar tentang air bersih.
2. Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah terkesan lambat dalam menanggapi pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat, yang berakibat masyarakat sering antri di sungai binamang untuk mendapatkan air bersih.
3. Tidak sepenuhnya masyarakat menerima informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pongkai Istiqomah terkait pembangunan infrastruktur embung desa.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, penelitian ini berfokus pada Komunikasi pembangunan infrastruktur embung desa di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.



#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah desa akan saling terkait dengan anggota BPD dan masyarakat. Maka dari itu didalam penelitian ini, peneliti akan membahas masalah yaitu Bagaimana Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar?

#### **E. Tujuan dan Manfaat**

##### **a Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.

##### **b Manfaat**

###### **1. Secara Teoritis:**

- 1) Sebagai penambah wawasan peneliti dan praktisi terkait dalam bidang Ilmu Komunikasi.
- 2) Sebagai bahan masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat ilmiah yaitu bidang Ilmu Komunikasi, terkhusus di bidang komunikasi pembangunan

###### **2. Secara Praktis:**

- 1) Memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar agar

menjadi pelopor kesejahteraan masyarakat Desa Pongkai Istiqomah sesuai dengan Undang-Undang pasal 78 No 6 Tahun 2014.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar kepada pemerintah, masyarakat dan praktisi terkait untuk memperhatikan, mengembangkan pikiran dan ide untuk kemajuan perdesaan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Literatur

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, penulis memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang ada.

##### 1. Komunikasi Pembangunan

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communication*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. sama disini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung artian/makna. Arti ini perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat didalam suatu kegiatan komunikasi.

Negara-negara yang sedang berkembang banyak menerapkan ilmu komunikasi pembangunan, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan bermaksud agar meningkatkan perkembangan masyarakat. Komunikasi pembangunan akan mengapuskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan.

Komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai)

suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pada apa yang dibangun. (Nasution, 2012:92)

Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan adalah upaya dan strategi, serta teknik dalam menyampaikan sebuah ide dan keterampilan pembangunan. Komunikasi pembangunan diawali dari pihak komunikator yang menyampaikan ide dan keterampilan dan diberikan kepada masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat yang dituju paham, dan dapat menerima, serta ikut andil dalam melaksanakan ide yang disampaikan komunikator. (Nasution, 2012:92).

Komunikasi pembangunan menurut Nora C Quebral dalam Harun dan Ardianto (2011:162) memiliki tujuan, tujuannya adalah:

*“The purpose of development communication is to advance development. Development requires that a mass of people with low rate of literacy and income, and the sosio-economic attributes that go with it, first of all be informed about and motivated to accept and use a sizeable body of hitherto unfamiliar ideas and skills in very much less time than that proces would normally take”*

(Komunikasi pembangunan bertujuan untuk memajukan pembangunan. Pembangunan memerlukan orang-orang dengan tingkat literasi (melek huruf) dan upah kerja kecil, dan atribut-atribut sosio-ekonomi bahwa mereka harus ikut serta, mula-mula mereka diberitahu tentang informasi dan didorong agar memahami dan menggunakan ide yang tidak biasa dan keterampilan-keterampilan dalam waktu singkat dibanding proses yang diambil dalam keadaan normal).



Agar komunikasi pembangunan dapat mencapai sasarannya dengan baik, serta dapat menghindarkan efek kemungkinan yang tidak baik, tentunya harus mempertimbangkan hal yang paling penting dan mendapati berupa prinsip-prinsip tertentu.

Menurut AED (1985) dalam Harun dan Ardianto (2011:163), komunikasi pembangunan memiliki empat strategi yang digunakan selama ini:

- a Strategi berdasarkan Media (*media based strategies*)  
Komunikator mengelompokkan kegiatan mereka disekitar medium tertentu yang mereka sukai.
- b Strategi desain Instruksional  
Memfokuskan cara individu-individu dalam melakukan pembelajaran yang dituju sebagai suatu target yang fundamental. Biasanya dipakai tenaga pendidik
- c Strategi Partisipatori  
Prinsip-prinsip penting dalam mengordinasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation an personal growth*)
- d Strategi Pemasaran.  
Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa.



Komunikasi pembangunan sendiri memiliki beberapa fungsi. Hedebro dalam Harun dan Ardianto (2011:165) mengidentifikasi tiga aspek komunikasi dan pembangunan, yaitu:

- a Pendekatan yang berfokus pada pembangunan sebuah bangsa, dan bagaimana media komunikasi dapat menyumbang dalam upaya tersebut.
- b Memahami kegunaan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik.
- c Orientasi kepada pendekatan perubahan yang terjadi pada suatu *communities* lokal atau desa.

Untuk menunjang kegiatan komunikasi pembangunan, maka memerlukan koordinasi, partisipasi masyarakat dan media informasi agar kelangsungan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan ketetapan yang sudah ditentukan baik itu oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa.

## **2. Perencanaan Komunikasi**

Sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan dan hambatan. Karena itu perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan diperlukan untuk mengimpelentasikan program-program yang ingin dicapai.

Robin Mehall dalam Cangara (2013: 47) mengatakan perencanaan komunikasi adalah salah satu dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilaksanakan agar berhubungan dengan komunikasi dalam mencapai tujuan, mengetahui cara yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat diraih, dan menentukan target komunikasi tersebut, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur hasil-hasil yang didapat dari program yang dilakukan.

Perencanaan komunikasi memiliki dua tipe, yakni perencanaan komunikasi strategik yang berarti perencanaan yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternative dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan strategic diwujudkan dalam target yang dapat dikuatifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi. Sedangkan perencanaan komunikasi operasional ialah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian tujuan.

Diperlukan pendekatan sesuai dengan tujuan dan target sasaran yang ingin diraih dalam menyusun suatu rencana agar menjadi baik . Banfield dan Meyerson dalam Cangara (2013:55) menyampaikan bahwa pada dasarnya pendekatan perencanaan dapat dilaksanakan dengan dua strategi, yakni:

a Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh

- 1) Adalah pendekatan perencanaan yang berdasarkan suatu kebijaksanaan yang bertujuan umum untuk memecahkan masalah yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan.
- 2) Berdasarkan spesifikasi bertujuan yang lengkap, menyeluruh dan terpadu antar kesatuan
- 3) Meramalkan yang disertai dengan sistem informasi agar lebih mencapai tujuannya.

b Pendekatan Perencanaan Terpilah

- 1) Adalah pendekatan perencanaan yang memperhatikan bagian-bagian kebijakan umum yang langsung terkait dengan unsur atau subsistem yang didahulukan.
- 2) Pendekatan perencanaan terpilah dalam lebih mudah dan realistis dalam mengimplementasikannya.

Perencanaan komunikasi juga memiliki lima hakikat didalam sebuah pelaksanaan, hakikat tersebut meliputi:

1. Perencanaan komunikasi sebagai proses, yang berarti untuk menggunakan pendekatan yang lebih rasional dan komprehensif.
2. Perencanaan komunikasi sebagai sebuah alur, yakni komunikasi yang dilihat sebagai bagian inti dari sebuah perencanaan nasional yang berkedudukan sama dengan perencanaan sektor lain.

3. Perencanaan komunikasi sebagai alih teknologi, yakni perencanaan komunikasi dapat menggunakan proyeksi berdasarkan perubahan-perubahan teknologi di bidang ICT (*Information, Communications, and Technology*) pada komunikasi.
4. Perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi, yang diartikan melihat sejauhmana komunikasi dapat dilaksanakan dalam melaksanakan program-program dengan memperhitungkan efisiensi biaya serta untuk keuntungan yang dapat diperoleh.
5. Perencanaan komunikasi sebagai evaluasi, yang dimaksudkan untuk memperoleh efektifitas hasil dari pelaksanaan program, umumnya digunakan untuk sebuah perbaikan atau perubahan dalam proses implementasinya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perencanaan komunikasi membantu untuk konsisten membawakan dalam sebuah pesan untuk menyampaikan kepada target sasaran. Perencanaan komunikasi penting terhadap sebuah kesuksesan suatu organisasi atau instansi. Perencanaan komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan.

### **3. Koordinasi**

Komunikasi, pengolah data, dan pengambilan keputusan akan bergerak dalam fungsi penentuan tujuan, pembentukan organisasi, penyusunan rencana, manajemen,



pemimpinan, dan penilaian, sedangkan pada keseluruhan fungsi akan bergerak kegiatan koordinasi.

Menurut E.F.L Brech dalam Sedarmayanti (2018:96) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Cara-cara untuk melakukan koordinasi menurut Sedarmayanti (2018:98), meliputi:

1. Pemberian langsung keterangan secara bersahabat. Tidak hanya keterangan mengenai pekerjaan, tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan karena akan menghasilkan koordinasi yang baik. (informasi)
2. Berusaha agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, individu tidak menuruti keinginan masing masing dalam mencapai tujuan, tujuan itu bersifat tujuan bersama. (Pengarahan)
3. Anggota didorong untuk bertukar pikiran, memberikan ide sebaik mungkin untuk menargetkan sasaran dan lain sebagainya.
4. Anggota diwajibkan untuk berpartisipasi dalam merumuskan sebuah sasaran agar dapat mengenai targetnya (Partisipasi)
5. Membina hubungan pribadi yang baik antara sesama karyawan (Human Relation)
6. Manajer tidak diharuskan untuk menggunakan komunikasi formal, menggunakan komunikasi informal dengan para bawahan agar terciptanya hubungan yang baik (Komunikasi)

Pemerintahan desa menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pemerintah desa atau disebut dengan nama lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### **4. Partisipasi Masyarakat**

Adisasmita (2013:121) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat dalam mengajak peran sertanya dalam menyusun kegiatan perencanaan dan melaksanakan proses pembangunan, dan merupakan aktualisasi atas kesadaran dan kemauan masyarakat agar rela memberikan bantuannya terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Alasan masyarakat sangat diperlukan untuk berperan serta dan didorong untuk ikut partisipasi dalam pembangunan desa, sebagaimana yang ditulis Adisasmita (2013:124), yaitu:

1. Masyarakat sesungguhnya sangat memahami keadaan tentang lingkungan sosial dan ekonomi mereka.
2. Masyarakat juga sesungguhnya dapat menganalisis sebab dan akibat dari bermacam kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
3. Masyarakat mampu menciptakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi mereka.
4. Masyarakat dapat menggunakan pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas mereka dan mengapai tujuan perubahan masyarakatnya.
5. Masyarakat dapat berfikir untuk *upgrade* sumber daya manusianya dan secara kemauan, sehingga dengan berdasarkan pada kepercayaan dirinya dan sumber-sumber yang besar agar mampu menghilangkan sebagian ketergantungan terhadap pihak lain.

Keikutsertaan masyarakat atau yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam empat tahap, yaitu:

- a Tahap penilaian, pada tahap ini melakukan identifikasi masalah dan sumberdaya yang mereka punya. Maka dari itu keikutsertaan masyarakat harus berperan vital dalam melihat permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut menjadi pandangan tersendiri bagi masyarakat.
- b Tahap *alternative* program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengajak warga untuk memberikan ide dalam menghadapi masalah

yang mereka hadapi dan saling memberikan solusi dengan memikirkan beberapa ide alternative.

- c Tahap pelaksanaan program atau aktivitas yang dikerjakan dengan mengimplementasikan proses yang telah direncanakan dengan konkret supaya tidak menjauh didalam pelaksanaan dilapangan
- d Tahap evaluasi (termasuk input, proses, dan hasil) yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat maupun lembaga terkait dalam melihat program yang sedang berjalan.

Ada empat jenjang yang dapat dilihat dalam partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Keterlibatan dalam membuat keputusan, yakni masyarakat berhak bersama dengan pemerintah desa untuk melakukan penyelenggaraan keputusan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak terlepas dari kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai.
4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan menilai



sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau belum sesuai dengan ketentuan yang ada. (Kaho, 2007:127).

Untuk pengambilan kebijakan, strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin memberikan informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai.

Menurut Mulyanto (1984:8) dalam Adisasmita (2013:96) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah:

1. Pendidikan
2. Pendapatan
3. Motivasi
4. Persepsi
5. Status sosial dan Percaya diri
6. Tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

## **5. Pemerintahan Desa**

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD menjadi.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tungga Ika.

Didalam sebuah pembangunan pedesaan, pemerintah desa bersama BPD, dan masyarakat desa melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang adalah musyawarah yang dilakukan sekali setahun guna merencanakan pembangunan berkelanjutan dan menetapkan hasil bersama.

a Kepala desa

Kepala desa merupakan pemimpin desa secara eksekutif yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui demokrasi. Kepala desa menjadi sumber pelopor berdirinya pembangunan bagi suatu desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang untuk mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Kepala desa juga berkewajiban mengembangkan perekonomian masyarakat desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, serta memberikan informasi kepada masyarakat desa. Hal ini menjadi tanggung jawab kepala desa untuk memberikan transparansi hasil pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat.

b Kaur Pemerintahan dan Setingkat

Kaur pemerintahan merupakan pembantu kepala desa dalam menjalankan visi dan misi desa agar menjadi desa yang baik. Kaur pemerintahan pada Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki beberapa bagian yakni:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
3. Kepala Urusan Keuangan
4. Kepala Urusan Perencanaan
5. Kaur Seksi Pemerintahan
6. Kaur Seksi Kesejahteraan
7. Kaur Seksi Pelayanan

c Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan penduduk desa berdasarkan wilayah penempatannya, merupakan sebagai salah satu lembaga yang mengadakan koordinasi dengan pemerintah desa dalam penetapan rancangan pembangunan. BPD memiliki fungsi, wewenang dan hak berdasarkan PP No: 72 Tahun 2005 yakni:

Fungsi BPD (1) Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD memiliki wewenang, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, peraturan desa dan peraturan kepala desa

BPD juga memiliki hak yakni (1) Meminta keterangan kepada kepala desa (2) Menyatakan pendapat



## 6. Pembangunan dan Infrastuktur

### a. Pembangunan

Penggunaan yang luas istilah *development* sebagai suatu kerangka berpikir yang konseptual atau *conseptual framework* untuk menyebut perubahan individu, institusional, nasional dan internasional, dan juga untuk menyebut kemajuan *progress* merupakan fenomena pasca PD II.

Menurut Innayatullah dalam Nasution (2012,103) pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Suld and Tyson (1978) dalam Nasution (2012:105) Pembangunan memiliki dua tujuan, yaitu

1. Tujuan umum (Goals) pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.

2. Tujuan khusus (Objektif) pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai suatu tingkat pencapaian sasaran dari suatu program-program tertentu.

Adapun pembangunan memiliki target tertentu agar mencapai suatu pembangunan yang efektif dan efisien yakni tujuan-tujuan yang dirumuskan secara benar, dipertimbangkan dengan secara rasionalitas dan dilakukan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada agar mendapatkan efek sebuah pembangunan (Nasution, 2012:43)

- b. Infrastruktur

Infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dikembangkan atau di butuhkan oleh agen-agen public untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, transportasi, dan pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial

Menurut Grigg dalam Kodoatie, (2005:8), infrastuktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang dibutuhkan untuk mamenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Sistematis infrastuktur merupakan alat pembantu utama yang menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menggerakkan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan pokok masyarakat. Definisi sistem infrastruktur adalah sebagai alat

penunjang kebutuhan *public* atau dasar dalam pembangunannya , alat, instalansi yang dibuat dan diinginkan agar kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat berfungsi. (Grigg dalam Kodoatie 2005: 9).

Ada tiga jenis infrastruktur menurut *The World Bank*, yaitu:

1. Ekonomi, dibuat agar menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi kebutuhan masyarakat (tenaga, telekomunikasi, air, drainase), sarana umum (jalan, bendungan, kanal, irigasi), dan sarana transportasi (rel, tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya).
2. Sosial, yang mencakup dunia pendidikan, bidang kesehatan, serta pembangunan taman rekreasi dan perumahan.
3. Infrastruktur sub-administrasi, meliputi penegakkan hukum, pengendali pelaksanaan, dan koordinasi.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Komunikasi Pembangunan**

Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang mengharapkan pesan timbal balik yang dijalin antara komunikator dengan penerima guna mencapai perubahan sosial, peningkatan taraf hidup dan keadilan dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian efektif atau tidaknya pembangunan yang dilakukan.

## 2. Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi baik itu dibagian keterampilan maupun perilaku agar pemangku tugas dalam lingkup yang dinaunginya mencapai tujuan yang terencana dengan target khalayak umum.

## 3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan berbentuk fisik diperuntukkan bagi masyarakat sebagai jembatan aktivitas sosial dan ekonomi yang menjadi sebuah pertanda kemajuan suatu daerah berdasarkan aspek yang berkelanjutan.

### C. Penelitian Terdahulu Relevan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	L.V. Ratna Devi Sakuntalawati (2019)	Komunikasi Pembangunan Dalam Pendampingan Komunitas Peternak Sapi Perah	Menunjukkan bahwa interaksi antara pendamping dan komunitas membutuhkan model komunikasi memusat untuk melakukan kerjasama
2	Adhi Iman Sulaiman, Toto Sogito, Ahmad Sabiq (2016)	Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran	Menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa



3	Monica Aprilla (2018)	Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Mempertahankan Kota Sehat Yang Berkelanjutan	Menunjukkan bahwa untuk penyebaran pesan menggunakan komunikasi interpersonal, kelompok dan media komunikasi yang mana mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan kota Payakumbuh.
---	-----------------------	--	--

**Sumber: Google Cendikia, 2019**

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh L.V. Ratna Devi Sakuntalawati, 2019 dengan judul Komunikasi Pembangunan Dalam Pendampingan Komunitas Sapi Perah. Terdapat persamaan menggunakan komunikasi pembangunan untuk mengetahui komunikasi guna mendapatkan perubahan, akan tetapi terdapat yakni pada penelitian saat ini peneliti lebih mendalami komunikasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan. Penelitian berikutnya oleh Adhi Iman Sulaiman, Toto Sogito dan Ahmad Sabiq, 2016 dengan judul Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran. Terdapat persamaan yakni seberapa penting pemerintah dan masyarakat sebagai partisipasi pembangunan dalam perencanaan, akan tetapi terdapat perbedaan yakni peneliti saat ini tidak melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perubahan, peneliti hanya melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Untuk penelitian selanjutnya oleh Monica Aprilla (2018) dengan judul Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Mempertahankan Kota Sehat Yang Berkelanjutan. Terdapat persamaan dengan penelitian saat ini, yakni melihat perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah guna melakukan perubahan dikalangan masyarakat, dan tentu memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini yang

mana penelitian saat ini menekankan kepada pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambaran, sehingga tidak menekankan pada angka. Kualitatif mencoba mendalami rumusan masalah dan fakta-fakta dilapangan yang ada.

Menurut Sugiyono (2018:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *potspotivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah tahapan yang berdasar dari pengamatan manusia dan faktor lainnya. Pengamat mengamati orang dilingkungan yang diteliti agar menimbulkan data yang bersifat penggambaran sesuatu yang apa adanya, dengan memberikan *point-point* pertanyaan tertulis mengenai masalah yang ada.

Berdasarkan pendekatan penelitian tersebut maka alasan peneliti mengambil penelitian kualitatif karena untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pongkai Istiqomah dalam pembangunan infrastruktur embung desa pada Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Menurut Moleong (2006:67) mengemukakan pengertian subjek penelitian adalah informan. Informan adalah “orang-orang” dalam latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi suatu tempat.

Penelitian kualitatif sangat tepat jika didasarkan pada tujuan masalah penelitian karena peneliti akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih mendalam terkait dengan masalah yang sudah peneliti rumuskan. Sehingga peneliti menarik informan berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun subjek penelitian ini yang menjadi informan utama sebanyak tiga orang yang terdiri dari Kepala Desa Pongkai Istiqomah sebagai komunikator karena untuk menjalankan program pembangunan memerlukan komunikasi yang baik, satu orang anggota BPD Pongkai Istiqomah karena dalam perencanaan pembangunan



perlu adanya bagian koordinasi agar tercapai tujuan pembangunan, dan satu orang masyarakat yang menjadi penanggung jawab pembangunan embung desa karena masyarakat sebagai penerima pesan pembangunan dari pemerintah.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu permasalahan yang dianggap penting berdasarkan penelitian atau kriteria penilaian atau kriteria tertentu dan memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. (Alwasilah, 2003:115)

Maka dari itu penelitian ini mengambil objek penelitian yakni komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur embung desa di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Menurut Bungin (2007:80) Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu, pelaku, tempat dan kegiatan yang di observasi. Lokasi penelitian yang dilakukan saat ini adalah Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena peneliti melihat bahwa pemerintah desa Pongkai Istiqomah kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur untuk masyarakat desa Pongkai Istiqomah.



## 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN, BULAN DAN MINGGU KE																												KET					
		2019				2020																													
		DES				JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN					JUL				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X																													
2	Seminar UP					X																													
3	Riset							X	X	X	X																								
4	Penelitian Lapangan												X	X	X																				
5	Pengolahan dan Analisis Data															X	X																		
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																X	X	X	X	X	X	X												
7	Ujian Skripsi																															X			
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																															X	X		
9	Penggandaan Serta Peyerahan Skripsi																															X	X		

#### **D. Sumber Data**

Menurut Bungin (2007:122) dalam proses pengumpulan data ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian. Data primer yang diterima antara lain mengenai tanggapan informan dan tentang data-data atau informasi yang diperlukan. Adapun alasan mengambil data primer dikarenakan peneliti langsung melakukan observasi kelengkapan dan melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang ditetapkan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder penelitian yang diperoleh di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Peneliti menggunakan data sekunder karena data yang didapatkan secara langsung sebagai penunjang. Seperti data-data perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur hingga dokumentasi yang menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian.



## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

### 1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2019:203) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi nonpartisipasi. Observasi nonpartisipasi adalah peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Maka dalam observasi nonpartisipasi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. (Basrowi dan Suwandi, 2008:209).

Adapun observasi yang peneliti lakukan yakni proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung desa. dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan observasi pada perencanaan karena perencanaan pembangunan infrastruktur embung desa sudah lewat.

## 2. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono, (2018:231) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun alasan peneliti melakukan teknik wawancara dikarenakan peneliti ingin menggali informasi-informasi mengenai hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah peneliti terapkan

## 3. Dokumentasi

Sebagian besar data yang tersedia berasal dari surat-surat, tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Sifat utama dari data ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga menjadi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah berlalu. Kumpulan data berbentuk tulisan dinamakan dokumen (Bungin, 2007:125). Adapun alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah agar bentuk kegiatan ini dapat dipertanggung jawabkan orisinalitasnya.

## F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan dan dianalisis.
2. Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Apabila menemukan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain.
3. Triangulasi Waktu dilakukan dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. (Sugiyono, 2019:368)

Berdasarkan tiga jenis triangulasi yang ada, maka pengujian data penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data, yang mana data tersebut didapat dari pemerintah desa, anggota BPD, dan penanggung jawab pelaksana pembangunan embung desa.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data yang akan dilakukan dengan menggunakan model interaktif. Analisa model interaktif menurut Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2018:246)

### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran semakin jelas. Sehingga reduksi data memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

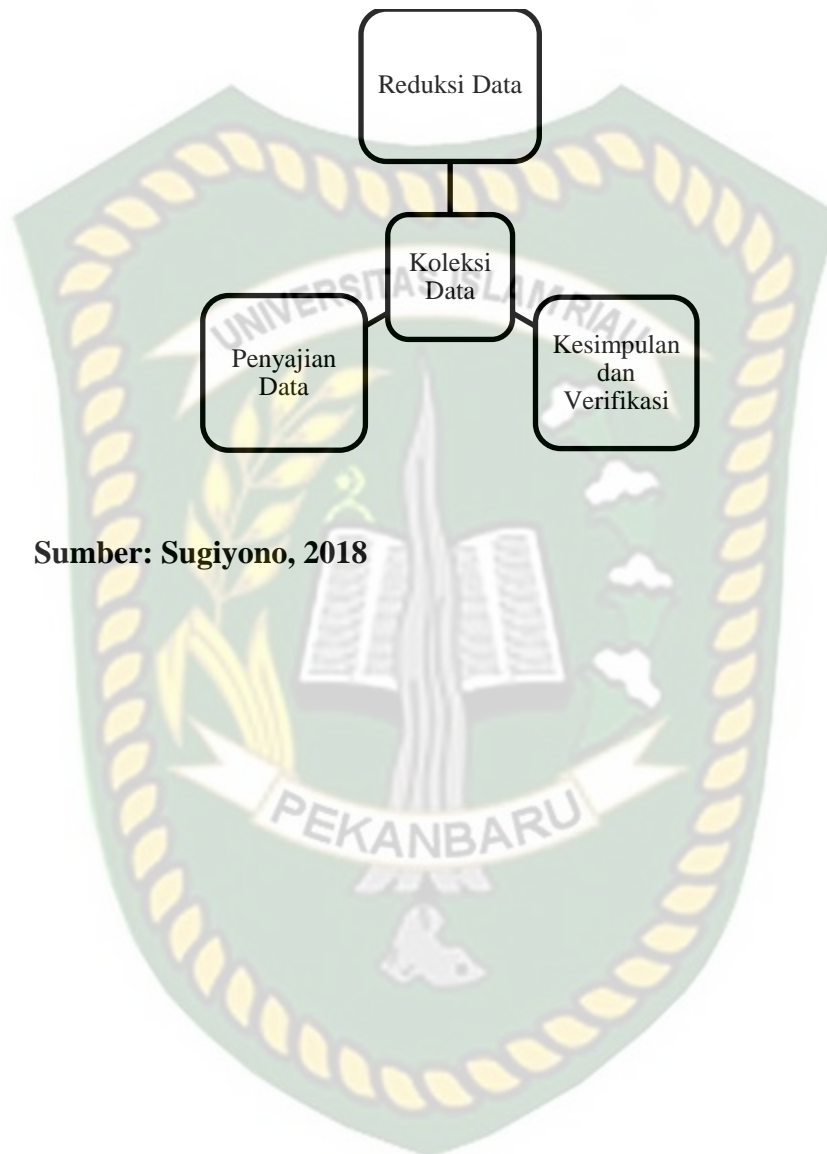
### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang ditelah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mencari bukti-bukti yang kuat untuk mendukung menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.



**Gambar 3.1****Model Miles dan Huberman dalam analisis data****Sumber: Sugiyono, 2018**

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Desa Pongkai Istiqomah**

Desa Pongkai Istiqomah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Pongkai Istiqomah diambil dari Kata Pongke (pangkal) dan Istiqomah (tetap pendirian). Tanah desa Pongkai Istiqomah yang dahulu juga merupakan salah satu tanah pembuatan Candi terbesar di Riau (Candi Muara Takus). Dari desa Pongkai menuju Ibu Kota Kecamatan dapat ditempuh dengan waktu 10 Menit sedangkan Jarak antara Desa Pongkai dengan Ibu Kota Kabupaten sendiri berjarak sekitar  $\pm 50$  Km dan jarak dengan Ibu Kota Provinsi  $\pm 110$  Km. Luas Desa Pongkai Istiqomah yaitu 600 Ha dengan Jumlah Penduduk 671 Jiwa, serta beriklim tropis dengan suhu rendah pada bulan November hingga Januari dengan capaian  $21^{\circ}\text{C}$  dan suhu panas di bulan Juni dengan suhu sekitar  $34^{\circ}\text{C}$  (Arsip Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah Tahun 2019).

Desa Pongkai Istiqomah berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Koto Ranah, Kabupaten Rokan Hulu
2. Sebelah Selatan : Desa Koto Tuo, Desa Binamang, Danau PLTA Koto Panjang

3. Sebelah Timur : Desa Binamang, Desa Ranah Sungkai
4. Sebelah barat : Desa Koto Tuo

Kawasan Desa Pongkai Istiqomah bertepatan langsung dengan arus air sungai Kampar, sehingga membuat desa Pongkai Istiqomah memiliki bendungan besar penampung air yang dilewati oleh para petani untuk pergi ke kebunnya menggunakan sampan/perahu. Bendungan air tersebut terbentuk secara alami, maka dari itu pembuatan infrastruktur embung desa dilakukan dengan cara membendung sebagian sungai agar diolah menjadi air bersih.

Embung desa sendiri dibangun diatas tanah yang memiliki luas  $5830 m^2$  dengan kedalaman air 3 meter. Untuk lebar bangunan embung desa yakni 11 meter dan panjang 10 meter yang dibangun dengan menggunakan dana desa berjumlah total Rp. 383.864.000 yang proses pelaksanaannya selama 126 hari.

**Tabel 4.1: Tabel anggaran pembangunan infrastruktur embung desa**

No	Pengadaan biaya embung desa	Jumlah
1	Bahan dasar (Semen, pasir, batu dll)	Rp. 170.854.000
2	Mesin pompa air 2 unit	Rp. 24.000.000
3	Biaya kepala tukang 2 orang selama 126 hari	Rp. 37.800.000
4	Upah pekerja 12 orang selama 126 hari	Rp. 151.200.000

**Sumber: Arsip Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah**

## 2. Anggaran Dana dan Musrenbang Desa Pongkai Istiqomah Tahun 2019

Sebuah pelaksanaan tentu memiliki sebuah perencanaan yang matang agar proses pelaksanaannya berjalan dengan efisien dan transparan. Desa Pongkai Istiqomah menjadi salah satu desa yang menggunakan dana APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dana APBDes sendiri berjumlah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 APBDes Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar 2019**

No	Pendapatan & Belanja Desa	Jumlah
1	Pendapatan Desa	
	a. Dana desa	a Rp 822.751.000
	b. Alokasi dana desa	b Rp 585.689.000
	c. Bagi hasil pajak & Retribusi	c Rp 31.445.000
2	Belanja desa	
	a Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	a Rp 549.429.700
	b Bidang pelaksanaan pembangunan desa	b Rp 847.951.000
	c Bidang pembinaan masyarakat	c Rp 87.891.000
	d Bidang pemberdayaan masyarakat	d Rp 5.653.000
	e Pembiayaan	e Rp 51.039.700

**Sumber: Arsip Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah**

Dana desa yang berjumlah Rp. 822.751.000 menjadi sebuah pertanggung jawaban seorang kepala desa untuk melaksanakan program-program pembangunan yang ada di desa.



Oleh sebab itu, saat akan membangun embung desa. Pemerintah diharuskan untuk melakukan perencanaan melalui sebuah forum diskusi bersama masyarakat yang bernama Musrenbang Desa agar pemilihan prioritas program dapat berjalan hingga menuju ketahap pelaksanaannya.

Sebelum melakukan Musrenbang Desa terlebih dahulu diadakan Musdus (musyawarah dusun) yang dikepalai oleh kepala dusun masing-masing yang berada di desa Pongkai Istiqomah. Dusun di desa Pongkai Istiqomah berjumlah tiga. Musdus Berperan sebagai forum permintaan masyarakat yang berada di dusun tersebut agar aspirasi dari masyarakat dusun bisa disampaikan oleh kepala dusun kepada pemerintah dalam forum Musrenbang Desa.

Hasil Musdus yang menjadi dasar dari permintaan masyarakat bagi wilayah dusun tersebut disampaikan langsung oleh kepala dusun kepada pemerintah desa. Dapat dilihat permintaan dari ketiga Dusun yang berada di Desa Pongkai Istiqomah beserta pihak lainnya sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Musrenbang Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2019**

No	Wilayah & Masyarakat	Usulan
1	Dusun I	a Rehap drainase b Sanitasi air bersih c Perbaikan dan pengaspalan jalan
2	Dusun II	a Penambahan/kelanjutan drainase b Pembuatan turaf
3	Dusun III	a Sarana air bersih b Rumah layak huni c Penambahan tiang listrik
4	Pemuda	a Embung desa b Penambahan perlengkapan olahraga

		c Pembangunan stadion mini
5	Tokoh masyarakat	a Embung desa b Pembangunan rumah pasar karet c Pembukaan akses jalan ke kebun plasma
6	BPD	a Embung desa b Pembukaan jalan ke sungai Binamang c Sumur gali di lokasi fasilitas umum d Penyediaan perlengkapan kuburan e Memutihkan status kebun plasma
7	Kesehatan	a Penyempurnaan gedung POSKESDES b Insentif kader posyandu
8	Ninik Mamak	a Embung desa b Pemberdayaan seni budaya c Insentif ninik mamak d Pelatihan peningkatan kapasitas ninik mamak
9	Paud/TK	a Kilo meter b Tong air, MCK c Moubilizer (alat permainan anak) d APE, Puzel untuk dalam ruangan
10	PKK	a Perlengkapan/peralatan untuk penyelenggaraan jenazah b Tenda desa c Pengeras suara d Bantuan modal untuk produk unggulan e Pelatihan peningkatan kapasitas PKK
11	PDTA	a Insentif guru b Kilo meter
12	Pendamping Desa	a Aula kantor desa b Pengusulan Musyawarah Dusun c Informasi dana desa d Pemilihan tim RKPDes tahu 2019

**Sumber : Arsip Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah**

Dapat dilihat dari hasil Musrenbang Desa Tahun 2019 bahwa permintaan sarana air bersih diminta oleh setiap dusun dan pihak lainnya yang menjadikan pemilihan prioritas oleh pemerintah akan adanya pembangunan embung desa agar masyarakat mendapatkan sarana air bersih.

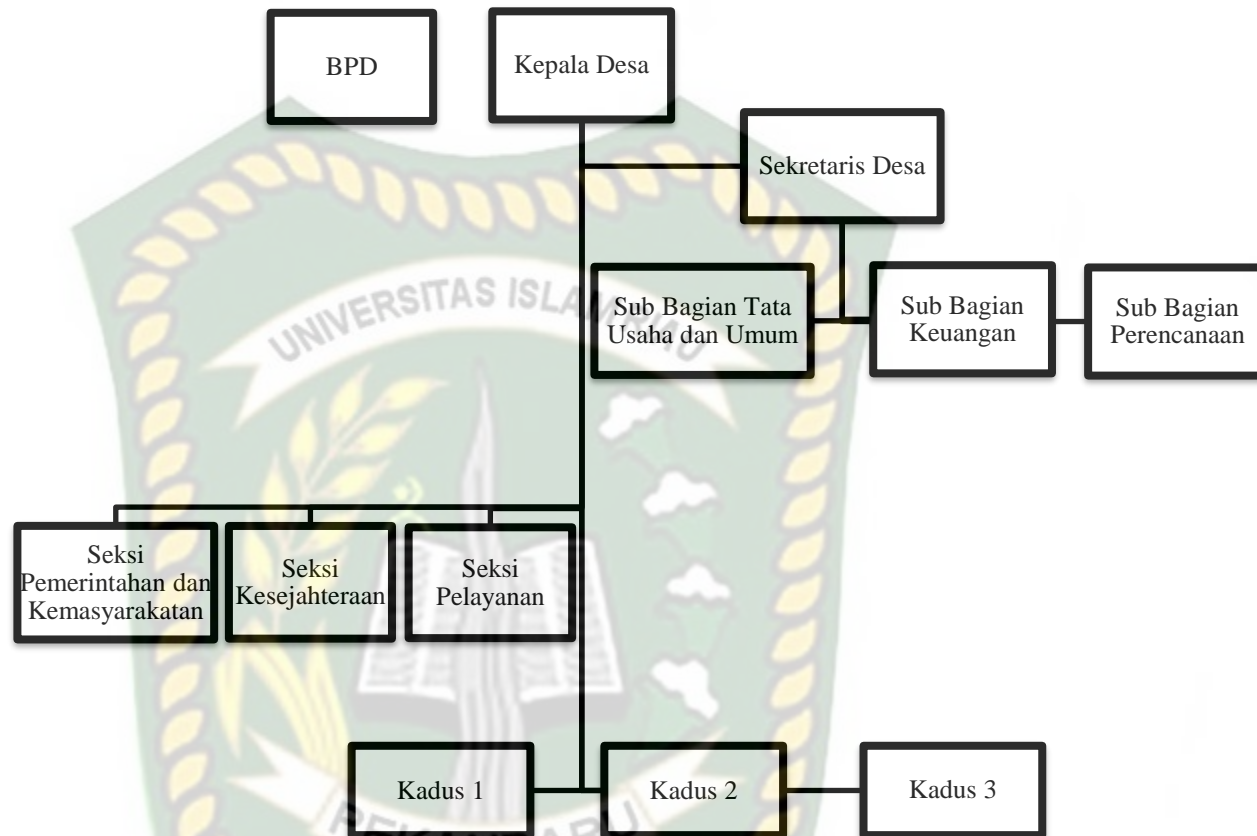
### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Beserta Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah

Tugas pokok Kepala Desa Pongkai Istiqomah adalah menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan aturan UU, sebagai pelaksana pembangunan, pembinaan masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Pongkai Istiqomah memiliki fungsi, yaitu:

- a. Tata praja pemerintahan desa, penetapan peraturan-peraturan di desa, membina masalah pertahanan, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjadi pelindung masyarakat, administrasi kependudukan dan penata wilayah.
- b. Membangun prasarana di pedesaan, dan juga menjadi pembangun bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Melakukan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- d. Sebagai Pelaksana hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosio-budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- e. Menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dengan sebaik mungkin.

Adapun untuk struktur organisasi tata kerja pemerintah Desa Pongkai Istiqomah adalah Sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Tata Kerja Pemerintahan Desa Pongkai Istiqomah**



Sumber: Dokumentasi peneliti



**Gambar 4.2**  
**Kantor Kepala Desa Pongkai Istiqomah**



**Sumber: Dokumentasi Peneliti**

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Profil Informan**

Dalam melakukan penelitian Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Maka peneliti menggambarkan dan menguraikan hasil dan pembahasan. Dengan berlangsungnya penelitian yang merupakan bantuan dari informan yang merupakan perwakilan dari Pemerintahan Desa Pongkai Istiqomah dan juga masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang peneliti butuhkan, peneliti melakukan wawancara kepada informan-informan yang mampu memberikan penjelasan secara mendalam sehingga tujuan penelitian ini dapat selesai dan tercapai.

Untuk sebuah penelitian, peneliti dituntut untuk mendapatkan informasi yang jelas dan relevan. Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 4.4**  
**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan atau Status
1	H. Elvizon Toni, S.H	Kepala Desa Pongkai Istiqomah
2	Muhammad Najuan, S.Pd.I	Ketua BPD Periode 2014-2019
3	Muhammad Husni	Masyarakat Sekaligus Tim RKPDes Tahun 2019

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga informan tersebut, peneliti mendapatkan berbagai macam informasi mengenai Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.

### **1. Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.**

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya merupakan sebuah jembatan arus agar setiap pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya menyampaikan kepada masyarakat apa yang akan dibuat agar semuanya menjadi selaras.

Dalam menyikapi APBN Dana Desa Pongkai Istiqomah. Pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Dana Desa diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat seperti dibidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur dan hal lainnya.

Untuk menjalankan dana desa tersebut, perencanaan menjadi hal yang sangat penting agar mendapati program yang menjadi prioritas pembangunan. Pembangunan embung desa menjadi program prioritas pembangunan pada tahun 2019 agar terpenuhnya sarana air bersih bagi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan embung desa peneliti bertanya kepada informan berupa; Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa Pongkai Istiqomah dalam pembangunan infrastruktur embung desa?

Kepala Desa Pongkai Istiqomah mengatakan:

“Pembuatan Embung Desa berawal dari terbentuknya inovasi desa. Desa Pongkai sangat membutuhkan air bersih karena seringnya musim kemarau yang terjadi maka masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih. Didalam Musrenbang juga kami mendapati banyaknya permintaan masyarakat pada embung desa. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk membuat embung desa ini. (Hasil wawancara dengan Bapak H. Elvizon Toni, S.H pada tanggal 03 Maret 2020)

Ketua BPD Desa Pongkai Istiqomah juga mengatakan bahwa:

“Sebelum dilakukan rapat Musrenbang Desa, kami anggota BPD melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat. Masyarakat menyampaikan aspirasi ke kami secara langsung bahwa kekurangan air bersih. Kami kumpulkan tim kami untuk mendengar aspirasi masyarakat agar kami dapat menyampaikan ke pemerintah desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan, S.Pd.I pada tanggal 03 Maret 2020)

Masyarakat sekaligus Tim RKPDes tahun 2019 memperjelas hal ini:

“Awalnya masyarakat meminta jalan dan air bersih karena keduanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak salah, kemarin setiap dusun meminta perbaikan jalan. Akan tetapi dalam rapat tersebut kami dari masyarakat sepakat untuk meminta air bersih karena musim kemarau kami tidak kuat untuk ngantri mandi di sungai Binamang” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan embung desa berawal dari inovasi desa. Perencanaan dilakukan pada saat dilaksanakannya Musrenbang Desa dan juga pemerintah melihat isu-isu yang menjadi *problem* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga pemerintah desa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat sebuah penampungan air baku yang mana penampungan air baku nanti dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian, didalam sebuah pembangunan tentu ada hambatan yang bisa mempengaruhi kepada tahap selanjutnya. Perencanaan yang baik akan meminimalisir keterlambatan pelaksanaan program yang akan dilakukan.

Pertanyaan berikutnya berupa, apa yang menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur embung desa? Kemudian Bapak Kepala Desa

Pongkai Istiqomah mengatakan:

“Hambatan yang terutama yakni alam, kita sebagai orang awam tidak bisa memprediksi hujan dan banjir itu kapan terjadinya. Yang kedua yakni dengan masyarakat sendiri, masyarakat masih kurang mengetahui dan menyangka bahwa saat pembangunan embung desa tersebut malah akan menyebabkan kebun masyarakat disekitaran embung desa kebanjiran. Banyak juga yang mengeluh baik secara langsung maupun tidak langsung.”(Hasil wawancara dengan Bapak H. Elvizon Toni, S.H pada tanggal 03 Maret 2020)

Ketua BPD juga mengatakan:



“Kami juga mendapat laporan dari masyarakat bahwa pembangunan embung desa terlalu dekat dengan perkebunan masyarakat. Sehingga masyarakat yang kebunnya dekat dengan pembuatan embung desa *complain* kepada kami dan mengatakan kami tidak melihat dulu dimana akan letak dibangun embungnya” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan, S.Pd.I pada tanggal 03 Maret 2020)

Masyarakat sekaligus Tim RKPDes tahun 2019 mengatakan hal yang serupa:

“Iya memang ada kemarin yang mengeluh kepada pemerintah desa dan anggota BPD. Saya juga yang bertugas sebagai Tim RKPDes juga membantu menjelaskan kepada masyarakat kita, jika kebun terendam air maka masyarakat meminta ganti rugi ke pemerintah desa. Tapi alhamdulillah tidak terjadi” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)

Disini dapat disimpulkan bahwa, pemerintah mendapati hambatan yang terjadi berupa keadaan alam dan juga masih adanya *complain* dari masyarakat yang takut lahan kebun miliknya terendam air. Jika suatu saat terjadi masalah dengan masyarakat tersebut, pemerintah menerapkan sistem ganti rugi jika lahan masyarakat terkena imbas dari pembangunan embung desa.

Kemudian daripada itu, pemerintah desa sangat membutuhkan peran masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan yang diharapkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat setempat. Masyarakat yang juga sebagai penerima manfaat pembangunan tentu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Peneliti kemudian bertanya bagaimana cara pemerintah mengajak masyarakat agar masyarakat ikut dalam memberikan saran pembangunan infrastruktur embung desa? Dan bapak Kepala Desa Pongkai Istiqomah menjawab

“Untuk mengajak masyarakat berpartisipasi, kami terlebih dahulu mengirimkan surat kepada masyarakat yang kami anggap layak untuk diundang. Kemudian kami menyampaikan juga lewat TOA Mushollah, dan juga jika kami melihat masyarakat sebelum diadakannya musrenbang langsung kami ajak untuk ikut. Tapi ada juga masyarakat yang tidak ikut pas sudah kami undang maupun secara langsung, mungkin karena ada kesibukan” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Elvizon Toni, S.H pada tanggal 03 Maret 2020)

Ketua BPD mengatakan hal senada:

“Kami tim BPD yang memfasilitasi dari Musdus hingga Musrenbang. Jadi kami juga mengajak masyarakat lainnya yang tidak mengikuti Musdus agar mengikut forum Musrenbang Desa agar saran diluar dari hasil Musdus akan didengar oleh pemerintah desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan, S.Pd.I pada tanggal 03 Maret 2020)

Masyarakat sekaligus Tim RKPDes tahun 2019 juga mengatakan:

“Pemerintah desa menyampaikan itu biasanya lewat TOA Mushollah di belakang, ada juga beberapa masyarakat yang diajak secara langsung waktu berpapasan dijalan” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)

Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah desa Pongkai Istiqomah dalam merencanakan pembangunan embung desa dengan mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dengan cara melakukan pemberian surat kepada masyarakat yang

dianggap layak, kemudian melakukan pengumuman melalui TOA Mushollah, dan pemerintah mengajak secara langsung masyarakat yang berpapasan dengan pemerintah desa di jalan.

Pertanyaan selanjutnya yakni; Bagaimana cara pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur embung desa? Kepala Desa Pongkai Istiqomah menjawab:

“Kami Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah melihat hasil daripada Musdus yang dilakukan oleh kepala dusun. Hasil dari Musdus yang sudah dievaluasi oleh BPD dipaparkan pada saat Musrenbang Desa. Pemilihan prioritas melihat isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kami tidak berani melakukan inovasi sendiri tanpa adanya perencanaan bersama masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Elvizon Toni, S.H pada tanggal 03 Maret 2020)

Hal serupa juga disampaikan Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum diadakan Rapat Musrenbang, terlebih dahulu kami mensponsori Musdus untuk menampung aspirasi masyarakat dari dusun dan dievaluasi oleh pihak BPD untuk disampaikan dalam Musrenbang dan nanti dipilih lagi mana yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan, S.Pd.I pada Tanggal 03 Maret 2020)

Selanjutnya keterangan ini diperjelas oleh masyarakat yang sekaligus Tim RKPDes tahun 2019:

“Iya, saya ikut didalam rapat Musdus hingga Musrenbang tersebut. Sebelum Musrenbang, kami setiap dusun juga menginginkan hak kami agar kebutuhan kami terpenuhi. Dari dusun kami, kami meminta embung desa yang terutama

karena kami tidak mau lagi susah payah mandi kesungai Binamang” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa menampung aspirasi masyarakat yakni dengan diadakannya musyawarah antar masyarakat. Musyawarah Dusun yang menjadi awalan dari penerimaan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada rapat paripurna desa (Musrenbang Desa). Kemudian, hasil daripada Musrenbang Desa dapat dipilih prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Setelah adanya proses perencanaan bersama dengan masyarakat. proses selanjutnya yakni tahap pelaksanaan. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan embung desa? Bapak kepala desa Pongkai Istiqomah menjawab:

“Pada proses pelaksanaan embung desa ini, kami mencari orang-orang desa Pongkai Istiqomah yang ahli dalam pertukangan. Kami koordinasi sama anggota BPD untuk menyampaikan secara lisan kepada masyarakat kalau kami sedang mencari tukang untuk pembangunan embung desa ini. Kemudian setelah mendapat masyarakat yang menjadi tukangnyanya tersebut, kami sampaikan proses pelaksanaannya sudah berjalan pada wirid bulanan dimesjid.” (Hasil wawancara dengan bapak H. Elvizon Toni, S.H pada tanggal 03 Maret 2020)

Ketua BPD Desa Pongkai Istiqomah juga mengatakan:

“Kepala desa koordinasi dulu dengan kami dalam mencari orang yang bisa bertukang. Setelah itu, kami menyampaikan kepada masyarakat yang kami rasa bisa menjadi tukang secara langsung jika pemerintah desa memerlukan tukang untuk pembangunan ini. kemudian dalam tahap pelaksanaannya, kami inikan sebagai pengawas desa, jadi segala urusan pemerintahan desa kami tahu. Pemerintah menyampaikan proses pelaksanaan biasanya pada saat wirid bulanan dimesjid” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan S.Pd.I pada tanggal 03 Maret 2020)



Kemudian Masyarakat sekaligus Tim RKPDes tahun 2020 mengatakan:

“Setahu saya pemerintah desa waktu pembangunan embung desa ini menyampaikan proses pembangunannya di wirid bulanan masjid. Untuk melaksanakan pembangunan ini kemarin itu anggota BPD yang nyampaikan ke masyarakat secara langsung termasuk juga bilang ke saya buat nyari orang yang bisa untuk bertukang ini” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)

Dapat disimpulkan dalam pembangunan embung desa ini. proses pelaksanaannya diawali dengan mengajak masyarakat dengan menyampaikan pesan secara lisan untuk menjadi tukang dan juga berkoordinasi dengan anggota BPD. Setelah itu, proses pelaksanaannya diumumkan pada saat wirid bulanan di masjid.

Kemudian untuk pertanyaan Selanjutnya, Bagaimana cara bapak kepala desa menanggapi pesan dari masyarakat dalam pembangunan embung desa?

Bapak Kepala Desa Pongkai Istiqomah menjawab:

“Kami tampung dulu seluruhnya pada forum Musrenbang Desa dan setiap melaksanakan Musrenbang Desa ada pendamping desa. Jadi setiap program pemerintah pendamping juga akan menyampaikan kepada masyarakat. Pendamping desa melakukan evaluasi cocok atau tidaknya untuk dilakukan pembangunan embung desa ini” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Elvizon Toni, SH pada tanggal 03 Maret 2020)

Dan Hal ini juga disampaikan oleh ketua BPD:

“Saat Musrenbang Desa tim pendamping desa selaku penilai program kinerja pemerintah menilai apa saja yang layak dibangun dari aspirasi masyarakat di Desa Pongkai istiqomah ini” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan, S.Pd.I pada tanggal 03 Maret 2020)

Masyarakat yang sekaligus Tim RKPDes tahun 2019 juga mengatakan:

“Seingat saya, waktu itu tim pendamping desa hadir saat Musrenbang Desa dan mereka yang menyampaikan kepada kami apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah dan akan di evaluasi juga bersama anggota BPD” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah menanggapi pesan-pesan dari masyarakat bersama tim terkait agar proses berjalannya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Dan juga, pemerintah menanggapi pesan masyarakat melalui forum Musrenbang Desa.

Untuk pertanyaan selanjutnya yakni, bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembangunan embung desa ini? Bapak Kepala Desa Pongkai Istiqomah menjawab:

“Kami evaluasi bersama dengan tim BPD. Kami lihat banyak tidak masyarakat yang menggunakannya. Kami musyawarah dengan masyarakat bahwa kami akan membebankan Rp 2000 setiap rumah untuk 1 kubik airnya. Jadi kami lihat tagihan dikilometer embung ini hampir keseluruhan rumah itu membayar paling sedikit Rp 4000/minggu. Jadi kami merasa bahwa embung ini sudah efektif buat masyarakat karena setiap rumah itu sudah menggunakan air embung ini. Dan juga alhamdulillah sampai sekarang belum ada terjadi komplek dari masyarakat” (Hasil wawancara dengan bapak H.Elvizon Toni S.H pada tanggal 25 Juni 2020)

Ketua BPD juga mengatakan:

“Kami pengawas desa tentu melihat bagaimana respon masyarakat dalam pembangunan embung ini. anggota BPD juga mengevaluasi efektif atau tidaknya buat masyarakat. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat juga belum ada komplek ke kami baik itu secara pembangunannya yang dekat

dengan kebun masyarakat, biayanya, dan lainnya. Secara pribadi saya juga mengatakan bahwa pembangunan embung desa sudah efektif. Tagihan dirumah saya sendiri biasanya Rp 7000- Rp 10000/minggu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan S.Pd.I pada tanggal 25 Juni 2020)

Masyarakat sekaligus tim RKPDes tahun 2019 juga mengatakan:

“Ya karena saya tidak punya sumur bor ya, saya rasa ini sudah efektif. Biasa saya juga sering mandi kesungai Binamang, tapi karena sudah ada embung ini saya sudah merasa puas tidak susah-susah lagi mencari air. Biasa tagihan embung saya itu bisa mencapai Rp 10000/minggu. Tapi itu tidak selalu, kadang juga dibawah itu tagihan saya. untuk soal tagihan saya tidak keberatan juga membayar Rp 2000/kubik airnya. (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Husni pada tanggal 25 Juni 2020)

Dapat disimpulkan dalam mengevaluasi pembangunan embung desa ini, pemerintah membebankan kepada setiap rumah untuk membayar Rp 2000/kubik airnya. Pemerintah berkoordinasi dengan BPD dalam menilai efektif atau tidaknya pembangunan embung ini dan juga masyarakat juga sudah banyak menggunakan embung ini.

Setelah menanggapi pesan-pesan dari masyarakat, penyebaran informasi merupakan sebuah langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui transparansi dari pemerintah, dan juga masyarakat luas merasa layak untuk mengetahui manfaat yang akan dibangun oleh pemerintah.

Pertanyaan berikutnya yakni bagaimana cara pemerintah desa melakukan penyebaran pesan pembangunan embung desa kepada masyarakat? Bapak H.

Elvizon Toni, S,H mengatakan:

“Kami menyampaikan hasil rapat Musrenbang Desa pada wirid bulanan, kepada masyarakat secara individu, dan kami membanting plakat pada tempat yang akan kami bangun. Kami juga menerima pertanyaan masyarakat dan kami jelaskan jika masyarakat kurang memahami apa yang akan dibangun” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Elvizon Toni, S.H pada tanggal 03 Maret 2020)

Kemudian Ketua BPD juga mengatakan:

“Pemerintah Desa memang menyampaikan lewat wirid bulanan. Wirid bulanan yang diadakan oleh Irmas Desa Pongkai Istiqomah. Selama proses dari perencanaan hingga kepelaksanaannya pemerintah menyampaikan proses pembangunan embung desa di wirid bulanan desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Najuan S.Pd.I pada tanggal 03 Maret 2020).

Dan hal ini di perjelas oleh masyarakat yang sekaligus Tim RKPDes tahun 2019:

“Seingat saya dulu waktu pembuatan embung desa pak kades menyampaikan pembangunan embung desa di masjid pas saat ada kegiatan wirid bulanan desa. Saya kebetulan pengurus masjid, jadi pemerintah desa juga menyampaikan apa yang akan dilakukan kedepannya. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)



Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan penyebaran pesan perencanaan pembangunan pada saat wirid bulanan di masjid. Pemerintah juga menyampaikan kegiatan mereka setiap bulannya yang mana agar masyarakat mengetahui jalannya program yang dilakukan oleh pemerintah.

Setelah adanya proses penyebaran yang dilakukan pemerintah. Media berperan dalam menyampaikan informasi. Kemudian peneliti bertanya, apa saja media yang digunakan oleh pemerintah dalam menyebarkan informasi perencanaan pembangunan infrastruktur embung desa? Bapak Kepala Desa menyampaikan bahwa:

“Kami membuat plakat yang berbentuk plang persegi yang berisi berita pembangunan embung desa ini”(Hasil wawancara dengan bapak H. Elvizon Toni, S.H pada tanggal 03 Maret 2020)

Hal senada juga diucapkan oleh ketua BPD:

“Agar masyarakat mengetahui dan kami sebagai tim pengawas program pembangunan di desa. Kami juga meminta kepada pemerintah desa agar melatakkkan plakat pembangunan tersebut.” (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Najuan S.Pd.I pada tanggal 03 Maret 2020)

Kemudian masyarakat sekaligus tim RKPDes mengatakan:

“iya kemarin itu ada plakat yang dibuat oleh pemerintah dekat embung desa.”  
”(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Husni pada tanggal 08 Maret 2020)

Dapat disimpulkan bahwa plakat masih menjadi media yang dibuat oleh pemerintah. Plakat tersebut dipasang agar semua masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Pongkai Istiqomah.

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.**

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai komunikasi pembangunan infrastruktur embung desa di desa Pongkai Istiqomah Kec. XIII Koto Kampar. Sebagaimana yang telah disebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar mencapai sebuah keberhasilan dalam komunikasi, terdapat proses-proses komunikasi. Proses ini juga dikenal dengan elemen komunikasi. Elemen komunikasi yakni berupa; komunikator, pesan, komunikan, saluran atau media, hambatan atau gangguan, umpan balik atau *feedback*, situasi, efek.

#### 1) Komunikator

Komunikator adalah penyampai informasi kepada komunikan. Pada pembangunan embung desa ini, kepala desa menjadi pihak yang memprakarsai sebuah pembangunan yang ada di lingkungan masyarakat. kepala desa dapat memberi gagasan-gagasan kepada masyarakat agar tercapainya program program yang berjalan di lingkungan desa.

#### 2) Pesan

Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator dalam hal ini kepala desa kepada komunikan. Pada pembangunan embung desa ini, kepala desa menyampaikan kepada masyarakat dan menyebarkan sebuah informasi pembangunan embung desa di Desa Pongkai Istiqomah

#### 3) Komunikan

Komunikan merupakan penerima pesan dari komunikator. Komunikan pada pembangunan infrastruktur embung desa ini yakni masyarakat desa Pongkai Istiqomah. Masyarakat menjadi penerima pesan dari pemerintah desa dalam sebuah proses pembangunan.

#### 4) Saluran atau media

Media merupakan alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Pemerintah desa menggunakan plakat dalam menyampaikan pesan pembangunan

infrastruktur embung desa. pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk terlibat menggunakan pengeras suara agar masyarakat ikut dalam merencanakan pembangunan embung desa.

5) Hambatan atau gangguan

Hambatan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan pemaknaan pesan yang komunikator sampaikan kepada masyarakat. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh komunikator dalam pembangunan infrastruktur embung desa menyebabkan masyarakat disinformasi sehingga proses pelaksanaan sempat tertunda.

6) Umpan balik/*feedback*

*Feedback* merupakan reaksi atau respon yang diberikan oleh komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya. Dalam ini, masyarakat memberikan pesan tidak terima karena masyarakat berfikir akan adanya dampak buruk bagi kebun masyarakat disekitaran pembangunan infrastruktur embung desa

7) Situasi

Situasi merupakan keadaan ketika proses komunikasi sedang berlangsung. Pada saat penyampaian informasi pembangunan infrastruktur embung desa, komunikator menyampaikan proses pembangunan pada saat wirid bulanan di masjid



#### 8) Efek

Hasil akhir dari proses komunikasi merupakan efek. Dalam ini, efek yang didapat oleh masyarakat yakni dengan adanya infrastruktur baru yang berupa embung desa agar masyarakat tidak lagi susah untuk mendapatkan air bersih disaat kekeringan

Nasution (2012:92) mengatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas, dengan tujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan.

Komunikasi pembangunan dimaksudkan secara sadar meningkatkan perkembangan manusiawi yang berarti bahwa komunikasi yang akan menghapus kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan. Kemudian komunikasi pembangunan bertujuan yaitu mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur embung desa di Desa Pongkai Istiqomah yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni pemerintah secara sadar pembangunan infrastruktur tersebut akan menghapuskan ketidakadilan terkait dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

(Nasution, 2012:43) mengatakan bahwa tujuan dalam sebuah pembangunan agar mencapai suatu pembangunan yang efektif dan efisien yakni tujuan yang dirumuskan secara benar, dipertimbangkan dengan secara rasionalitas dan dilakukan

dengan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan melalui aspirasi antara suatu situasi yang ada agar mendapatkan efek sebuah pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembantu utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat disebut sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalansi yang dibutuhkan agar berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie 2005:9).

Agar terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat, partisipasi masyarakat dirasa sangat perlu dalam sebuah perencanaan sebuah pembangunan. Adisasmita (2013:121) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat dalam mengajak peran sertanya dalam kegiatan menyusun perencanaan dan melaksanakan proses pembangunan, dan merupakan aktualisasi atas kesadaran dan kemauan masyarakat agar rela memberikan bantuannya terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Dalam sebuah pembangunan, tentu dibutuhkan peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang berperan dalam menyampaikan aspirasi tentu akan membuat pemerintah desa mudah dalam melakukan tugasnya. Pemerintah desa dapat mendengar saran-saran yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

Pembangunan embung desa sendiri tidak terlepas dari peran masyarakatnya dalam menyampaikan aspirasi. Strategi partisipatori digunakan oleh pemerintah desa Pongkai Istiqomah dalam mengajak masyarakat untuk sama-sama ikut dalam

menyampaikan aspirasinya pada saat musyawarah. Strategi partisipatori menurut AED (1985) dalam Harun dan Ardianto (2011) yakni strategi yang menggunakan prinsip penting dalam mengkoordinasikan untuk berkerja sama dalam komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community and personal growth*)

Strategi partisipatori digunakan agar pemerintah desa bisa mendengarkan gagasan dan aspirasi dari masyarakatnya. Pemerintah desa jadi lebih mengetahui akan terjadinya sebuah permasalahan jika adanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah desa Pongkai Istiqomah bersama dengan masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan inovasi baru agar terwujudnya pemenuhan keadilan bagi masyarakat yang kurang air bersih.

Strategi tersebut dapat diketahui dari keterangan kepala desa Pongkai Istiqomah bahwa pemerintah desa mengajak masyarakat untuk melakukan Musdus hingga Musrenbang Desa yang mana pemerintah desa tidak berani untuk bergerak sendiri dalam melakukan pembangunan infrastruktur embung desa tersebut. Dan juga, untuk melakukan tahap pelaksanaan, pemerintah mengajak masyarakatnya tanpa melibatkan pihak ketiga.

Komunikasi timbal balik yang terjalin antara pemerintah desa Pongkai Istiqomah dengan masyarakat pada saat musdus dan musrenbang desa yang menjadikan terwujudnya pembangunan embung desa tersebut. Masyarakat memberikan aspirasi-aspirasinya kepada pemerintah desa melalui musdus hingga musrenbang desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan

aspirasinya, pemerintah tentu mengetahui apa saja yang menjadi *problem* dilingkungan masyarakat.

Dalam mengajak masyarakat agar ikut berperan serta dalam proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengakomodasi seluruh biaya musyawarah agar masyarakat masih merasa memiliki *sense of belonging* dan *sense of responsibility* suatu desa. Penyampaian gagasan, aspirasi dan sebagainya dari masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Bagi pemerintah desa, gagasan, aspirasi dan sebagainya menjadi sebuah bahan evaluasi agar sebuah pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.

#### **a Tahap Perencanaan**

Pembangunan infrastruktur embung desa inipun melalui proses perencanaan yang didasari oleh hasil Musrenbang Desa bersama dengan masyarakat dan anggota anggota BPD. Dalam Perencanaan komunikasi, perencanaan yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur embung desa yakni pendekatan perencanaan terpilah.

Banfield dan Meyerson dalam Cangara (2013) mengatakan pendekatan perencanaan terpilah ialah pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian-bagian kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. Pemerintah menggunakan perencanaan terpilah agar aspirasi dari masyarakat yang ditampung oleh pemerintah desa dapat difokuskan menjadi satu tujuan pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama air bersih.



Untuk mencapai tujuan pembangunan infrastuktur embung desa tersebut, tahapan perencanaan sangat dibutuhkan. Tahapan perencanaan pembangunan embung desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pongkai Istiqomah yakni dengan cara musyawarah dengan lembaga terkait beserta juga dengan lapisan masyarakat. Dengan seringnya kekurangan air bersih dikala musim kemarau, banyak masyarakat desa Pongkai Istiqomah yang sering antri untuk mendapatkan air bersih di Sungai Binamang.

Pemerintah beserta masyarakat menciptakan sebuah Inovasi Desa agar terciptanya keadilan dilingkungan masyarakat. Inovasi desa tersebut berupa sebuah proyek pembangunan embung desa yang mana desa Pongkai Istiqomah sangat sering kekurangan air bersih saat mengalami musim kemarau.

Inovasi Desa terbentuk pada saat diadakannya perencanaan melalui musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat. Musyawarah yang dilakukan berupa Musdus (Musyawarah Dusun) dan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Musdus menjadi patokan awal pemerintah desa untuk melihat aspirasi masyarakat yang berada pada setiap dusun. Hasil daripada musdus tersebut dibawa oleh kepala dusun pada saat rapat musrenbang desa. kemudian pada saat musrenbang desa, pemerintah desa memilih salah satu hasil daripada musdus yang mana melihat isu yang sering terjadi dilingkungan masyarakat hingga penentuan pembangunan prioritas bagi Desa Pongkai Istiqomah.

Ide dalam Pembangunan infrastruktur embung desa timbul dari peran masyarakatnya yang disampaikan kepada pemerintah desa Pongkai Istiqomah. Pemerintah desa Pongkai Istiqomah melakukan perencanaan bersama dengan masyarakat melalui tahapan-tahapan yang diperlukan. Tahapan perencanaan, penyebaran pesan kepada masyarakat dan penggunaan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi cara pemerintah agar terwujudnya pembangunan infrastruktur embung desa.

Penggunaan Anggaran Dana Desa dan berdasarkan dari banyaknya aspirasi masyarakat akan pemenuhan kebutuhan air bersih. Menjadikan Pembangunan Infrastruktur Embung desa menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2019 karena desa Pongkai Istiqomah yang sering mengalami musim kemarau, serta juga masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan sumur bor dan juga masyarakat sudah malas buat antri di sungai untuk mendapatkan air bersih.

#### **b Tahap Pelaksanaan**

Setelah adanya tahap perencanaan, kemudian dilanjut hingga ketahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung desa. Tahap pelaksanaan embung desa ini berjalan selama 126 hari. Selama proses pelaksanaan sendiri sering tertunda karena adanya hambatan baik itu masalah alam menjadi masalah utama untuk melakukan proses pelaksanaannya. Kemudian adanya keluhan masyarakat juga menghambat pelaksanaan karena masyarakat yang awalnya ingin menikmati hail

pembangunan menjadi takut karena kebun yang dekat dengan pembangunan embung akan terendam oleh air disekitaran embung tersebut.

Pada tahap pelaksanaan ini, pemerintah desa menyampaikan proses pelaksanaannya setiap bulan pada wirid bulanan. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam menyampaikan proses pelaksanaannya agar masyarakat tidak curiga kepada pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung desa ini pemerintah mengajak siapapun masyarakat yang bisa untuk menjadi tukang dengan cara berkomunikasi secara langsung menggunakan lisan. Pihak pemerintah desa juga berkoordinasi dengan pihak BPD yang mengawasi proses berjalannya pembangunan embung desa ini. Pemerintah desa sebagai komunikator pesan pembangunan berusaha agar tidak terjadinya kesalahpahaman dengan masyarakat dalam menyampaikan pesan pembangunannya.

### **c Tahap Evaluasi**

Pada tahap evaluasi, pemerintah desa Pongkai Istiqomah berkoordinasi dengan BPD dalam melakukan evaluasi pembangunan embung desa. Pemerintah desa menilai berguna atau tidaknya melihat dari total tagihan setiap rumah. Pemerintah desa Pongkai Istiqomah mengklaim hampir seluruh rumah masyarakat menggunakan air bersih yang berasal dari embung desa. Pemerintah juga menilai dari ada atau tidak adanya keluhan dari masyarakat terhadap embung desa ini.

Kemudian daripada itu, penulis menganalisa dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pongkai Istiqomah. Pemerintah desa Pongkai Istiqomah masih kurang melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebun disekitaran embung menjadi mengeluh akan pembangunan infrastruktur embung desa yang pemerintah desa buat. Berdasarkan keterangan yang diberikan, penulis menganalisa bahwa keluhan masyarakat seharusnya bisa diminimalisir jika pemerintah desa Pongkai Istiqomah melakukan penyampaian informasi dengan baik. Maka keluhan dari masyarakat tidak menjadi hal yang paling sulit bagi pemerintah.

Dengan kurangnya penyampaian informasi dengan masyarakat, masyarakat luas menjadi tidak memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Hal ini juga berkaitan dengan komunikasi pembangunan yang mana pihak yang memprakarsai pembangunan tidak mencapai tujuan komunikasi pembangunan kepada masyarakat luas dalam menyampaikan informasi.

Kemudian dari pada itu, penyebaran pesan seperti sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui akan adanya proyek pembangunan infrastruktur embung desa. Pemerintah desa Pongkai Istiqomah melakukan penyebaran pesan pembuatan infrastruktur embung desa tersebut melalui wirid bulanan di Masjid. Hal ini juga menjadi analisa bagi penulis bahwa penyebaran pesan yang dilakukan oleh pemerintah terlihat masih kurang etis dalam menyebarkan



pesan pembangunan. Yang mana Masjid yang seharusnya sebagai sarana keagamaan menjadi sebuah forum penyampaian pesan pembangunan.

Hasil observasi peneliti sendiri, hingga saat ini sudah banyak masyarakat menggunakan air bersih. Hal ini peneliti ketahui bahwa semenjak jadinya pembangunan embung desa tersebut, masyarakat sudah jarang untuk mandi di sungai Binamang lagi.

Kemudian dalam penelitian ini, penulis menganalisa cara pemerintah desa dalam mengajak masyarakatnya ikut didalam proses pembangunan infrastruktur embung desa yakni dengan cara mengundang menggunakan surat resmi. Pemerintah desa Pongkai Istiqomah mengundang masyarakat dengan surat undangan resmi agar masyarakat bisa ikut menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah desa. Hasil analisa penulis dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Pongkai Istiqomah yakni pemberian surat undangan resmi hanya untuk orang yang dianggap layak ikut dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga masih adanya masyarakat dengan tingkat literasi yang baik tidak bisa menyampaikan pesan karena tidak adanya undangan resmi dari pemerintah desa.

Pemerintah desa Pongkai Istiqomah juga menggunakan strategi berdasarkan media dalam menyampaikan pesan pembangunan embung desa. Strategi ini sangat sering digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat tidak hilang kepada pihak yang memprakarsai

pembangunan. Media yang digunakan oleh pemerintah desa yakni plakat yang diletakkan didekat pembangunan infrastruktur embung desa tersebut.

Pemerintah menganggap bahwa meletakkan plakat agar masyarakat luas dapat mengetahui pembangunan infrastruktur embung desa. Penggunaan media plakat sendiri saat ini sudah tertinggal sangat jauh. Kebanyakan masyarakat sekarang sudah menggunakan media online yang lebih praktis untuk mendapatkan informasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan atas dasar sebuah masalah yang didapatkan oleh peneliti dari komunikasi pembangunan infrastruktur embung desa di desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Pemerintah desa wajib dalam menyampaikan sebuah pesan pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat masih memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki sebuah desa. Dalam pembangunan embung desa, kepala desa Pongkai Istiqomah telah menjadi sebagai komunikator pembangunan dengan cukup baik. Adapun komunikasi pembangunan infrastruktur embung desa yakni:

1. Kemampuan kepala desa Pongkai Istiqomah untuk mengajak masyarakat dengan menggunakan strategi partisipatori dan media agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur embung desa.
2. Melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat secara tatap muka (*face to face*) dengan masyarakat jika ada masyarakat yang komplek akan pembangunan embung desa tersebut.

3. Pemerintah desa menerapkan pendekatan perencanaan terpilah dengan cara menampung aspirasi masyarakat agar aspirasi masyarakat tersebut dapat menjadi sebuah program prioritas di desa.
4. Masyarakat dengan pemerintah desa dapat melakukan komunikasi timbal balik yang berdampak akan sebuah pembangunan infrastruktur yang berguna bagi masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan. Peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Agar terwujudnya sebuah pembangunan infrastruktur yang berguna. Kepala Desa harus menjadi komunikator dan pelayan yang baik untuk masyarakat, serta mampu mengayomi hingga mampu untuk menerima kritik, aspirasi, dan saran dari masyarakat.
2. Diharapkan juga kepada Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah lebih sering melakukan sosialisasi tentang pembangunan. Tidak hanya pembangunan embung desa saat ini saja. Akan tetapi setiap kegiatan pembangunan kedepannya untuk peningkatan perkembangan masyarakat.
3. Untuk kedepannya agar Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah dalam memberikan pesan pembangunan dengan menggunakan media yang lebih modern seperti media sosial karena masyarakat saat ini sudah banyak menggunakan media sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Alwasillah, A. Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Dunia Pustaka Jaya: Jakarta
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rinepka Cipta: Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Putra Grafika: Jakarta
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. PT Raja Grafindo: Jakarta
- Harun, Rochajat & Ardianto. Elvinaro. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. 2011. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik*. Indonesia. Raja Grafindo: Jakarta
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta Pusat
- Kodoatie, J. Robert. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Muhammad, Arni. 2015. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2012. *Komunikasi Pembangunan*. Simbios Rekatama Media: Bandung
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Roskarya: Bandung
- Nasution, Zulkarimen. 2012. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. PT Refika Aditama: Bandung
- Soyomukti, Nurani. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Ar-Ruzz: Jogjakarta
- Sugiyono. 2018. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. CV Pustaka Setia: Bandung

Susantono, dkk. 2010. *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Esensi Erlangga Group: Jakarta

Yasir. 2011. *Perencanaan Komunikasi*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru

**Jurnal:**

Astuti, Linda & Buldani, Khairil. 2016. Model Lasswell Dalam Komunikasi Pembangunan Kawasan Wisata Bengkulu. *Jurnal Professional FIS UNIVED*. 3 (3): 45-50

Aprilla, Monica. 2018. Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Mempertahankan Kota Sehat Yang Berkelanjutan. *JOM VISIT*. 5 (1): 1-11

Imam, Adhi S. 2018. Komunikasi Pembangunan Melalui Program Pemberdayaan Sebagai Materi Pembelajaran Di Pesantren. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 16 (2): 286-296

Imam, Adhi S, dkk. 2016. Komunikasi Pembangunan Partisipatif Untuk Pemberdayaan Buruh Migran. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*. 13 (2): 233-252

Imran, Maharani & Armawan, Iwan. 2019. Optimalisasi Smart City Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17 (1): 81-85

Sakuntalawati, L.V Ratna Devi. 2019. Komunikasi Pembangunan Dalam Pendampingan Komunitas Peternak Sapi Perah. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 17 (2): 200-204

**Dokumen Lain:**

Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah

Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

UUD RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

